

LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA
NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN
KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI
NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA
NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 25 Juni 2007
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR-RI
Acara : 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh Menteri Luar Negeri
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir : 43 orang Anggota dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Menteri Luar Negeri, DR. Noer Hassan Wirajuda, S.H., L.L.M., beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2007 dengan waktu dan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap warga Indonesia khususnya TKI di luar negeri harus menjadi fokus/perhatian Departemen Luar Negeri dengan memperhatikan kondisi TKI yang sering dilanggar hak-haknya, terutama tenaga kerja wanita yang banyak menjadi korban pelecehan, penganiayaan, dan kekerasan fisik oleh majikannya. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI minta Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan kordinasi antar instansi pemerintah terkait, seperti Depnakertrans, Imigrasi/Depkumham, serta meningkatkan pemantauan perkembangan TKI secara cermat, dan upaya melindungi, membela dan memberikan bantuan hukum terhadap TKI, agar pelanggaran hukum, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap TKI tidak terulang lagi. Berkaitan dengan itu, Komisi I DPR RI menghargai tindakan cepat Pemerintah c.q. KBRI Malaysia yang secara cepat menangani masalah yang dihadapi Tenaga Kerja Wanita Indonesia, Sdri. Ceriyati.
2. Komisi I DPR RI menghargai upaya Pemerintah dalam pembentukan *citizen service* pada beberapa perwakilan RI di Luar Negeri dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI minta Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan kordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait, dan secara skala

prioritas membuka pelayanan *citizen service* di luar negeri yang banyak terdapat TKI, khususnya di Malaysia, negara-negara Arab, Taiwan, dan Hongkong.

3. Sehubungan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama pertahanan (DCA) antara Indonesia dan Singapura, Komisi I DPR RI menolak DCA dalam bentuk dan rumusannya seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Pemerintah harus terus memperjuangkan perbaikan substansi DCA melalui pembicaraan *Implementing Arrangements* (IA) DCA tersebut. Mengenai *Extradition Treaty*, Komisi I DPR RI minta agar Pemerintah segera menyampaikan kepada DPR RI untuk dibahas secara komprehensif dalam proses ratifikasi.
4. Sehubungan dengan pembahasan isu kemerdekaan Kosovo di DK PBB, secara prinsipil Komisi I DPR RI mendukung gagasan kemerdekaan Kosovo, dan upaya mewujudkannya harus melalui proses dialog damai dalam kerangka payung Uni Eropa.
5. Untuk mengatasi keterlambatan penempatan Duta Besar RI di luar negeri yang belakangan ini terjadi, Komisi I DPR RI menyarankan agar proses penetapan pemilihan Duta Besar sebaiknya dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya. Dalam hubungan ini, perlu ditingkatkan kualitas proses rekrutmen para calon Dubes dengan berbasis integritas, kompetensi, kemampuan menguasai permasalahan, dan komunikasi, serta kemampuan memperjuangkan kepentingan nasional.
6. Komisi I DPR RI mendukung sikap Pemerintah yang menegaskan pengakuannya terhadap Pemerintah Palestina bersatu yang terdiri dari kelompok FATAH dan HAMAS dengan keutuhan wilayahnya. Pemerintah perlu terus mendukung dan memperjuangkan perdamaian Timur Tengah atas dasar kemerdekaan penuh, dan integritas wilayah negara Palestina merdeka, serta hidup berdampingan secara damai antar negara kawasan Timur Tengah serta menggalang pemberian bantuan kemanusiaan kepada Rakyat Palestina yang mengalami penderitaan berkepanjangan akibat konflik.
Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI menghargai sikap Pemerintah di Dewan Keamanan PBB yang berhasil mencegah lahirnya *Presidential Statement* yang mengutuk Iran atas kasus penahanan marinir Inggris, dan menggagalkan *Press Statement* yang menyalahkan Presiden Iran atas pernyataannya mengenai kehancuran rezim Zionisme.
7. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyampaikan ke DPR RI Perjanjian Internasional yang belum diratifikasi DPR RI dengan prioritas, antara lain : *Lombok Treaty*, *International Convention on Protection of the Rights of All Migrant Workers*, *Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, dan *Rome Statue of International Criminal Court*.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 18.50 WIB

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA
A- 525